

NU, Negara, Pasca Gus Dur

Apa yang istimewa dari pelaksanaan Mukhtamar NU di Kediri di penghujung abad ini? Adakah makna khusus bagi warga *nabdliyin* setelah Gus Dur terpilih sebagai kepala negara, sebagai presiden Republik Indonesia?

Mungkin Mukhtamar kali ini merupakan suatu yang unik bagi warga NU. Bukan karena ada sesuatu yang mendesak untuk dicapai di masa depan, di awal milenium baru, bukan pula soal memori kolektif warga NU tentang sejarahnya di masa lalu, tepatnya selama lima tahun terakhir ini. Bisa jadi di sana ada pesta kemenangan Gus Dur terpilih kembali memimpin NU di sebuah restoran Jakarta, ada "NU tandingan" dengan Abu Hasan sebagai tokoh sentralnya, ada isu Pak Harto tidak mau menerima Gus Dur di istana, tapi justru yang terakhir ini malah didatangi di Probolinggo dalam kesempatan Munas RMI. Ada berbagai kerusuhan dan pembantaian "dukun" di kantong-kantong NU, dan ada pula "naga hijau". Ada gandengan tangan dengan Megawati, dan juga ada rangkulan dengan Mbak Tutut.

Tapi, masuknya NU dalam lingkungan negara tentu mengundang persoalan yang cukup serius. Selama lima tahun itu, muncul kesadaran mengidentikkan diri dengan gerakan *civil society*, tapi ada pula PKB yang disebut sebagai "telor"-nya NU, sementara partai lainnya disebut dengan sebutan yang kurang mengesankan. Sebelumnya, NU menyatakan lebih menarik jarak dengan kekuasaan sebagai kekuatan moral dan pengimbang, tapi kini ia ingin bermain dan

malah masuk dalam kekuasaan. Dari sini muncul seruan untuk memperkuat NU agar tidak dipermainkan oleh hiruk-pikuk partai yang meninabobokkan. Bisa jadi ada yang mengatakan bahwa beberapa tokoh *civil society* di Eropa Timur, seperti Lech Walesa di Polandia dan Vaclav Havel di Ceko, pernah menjabat sebagai kepala negara. Lalu, apa salahnya Gus Dur yang dulunya dikenal sebagai "pejuang *civil society*" menjadi presiden?

Mungkin persoalannya bukan semata karena Gus Dur menjadi presiden atau tidak. Tapi soal institusi semacam NU itulah yang ikut-ikutan mau kena "kecipratan" dengan keberadaan Gus Dur jadi presiden. Mungkin itu dilihatnya sebagai berkah. Bukankah selama belasan tahun terakhir ini NU selalu dipinggirkan oleh kekuasaan? Wajar, bila ada yang mengatakan, seperti terungkap dalam satu diskusi di P3M awal November lalu, bahwa kita lebih baik memanfaatkan momentum singkat ini sebelum lepas direbut orang lain! Atau, bisa jadi itu cobaan, seperti yang dirasakan oleh anak-anak mudanya yang berkumpul di Yogyakarta pertengahan bulan ini yang ingin membentuk jaringan oposisi generasi muda NU.

Selain itu, berapakah jumlah orang yang mampu memahami ide-ide Gus Dur soal hubungan antara negara dan masyarakat, antara agama dan negara. Misalnya, ide Gus Dur tentang sekularisasi, tentang pemisahan wewenang antara agama dan negara, dan juga tentang etika sosial. Malah, yang kita temukan adalah munculnya ide

“penyatuan agama dan negara” seperti yang dikemukakan Masdar F. Mas’udi sebagai konsekuensi dari ide penyatuan pajak dan zakatnya. Juga kita lihat pada Hasyim Muzadi yang melontarkan ide “hubungan agama dan negara pada tataran substantif-inklusif, dan bukan pada tataran formalistik-eksklusif”. Bukankah ini tidak ada bedanya dengan gagasan “Islamisasi negara” yang ramai dilontarkan tokoh-tokoh ICMI semacam Nurcolish Madjid dan Dawam Rahardjo?

Di sinilah perlunya kita menguji apakah NU mampu mencatat satu terobosan baru dalam persoalan hubungan agama dan negara. Memang, ada beberapa hal yang tidak mungkin dicapai kaum “Islam modernis”. Sejak Munas di Lombok 1997, muncul ide kebolehan perempuan menjadi presiden, sehingga memungkinkan mulusnya PKB menerima Megawati sebagai calon presiden pasca pemilu 1999. Muncul sejumlah program-program pemberdayaan masyarakat, seperti *civic education*-nya LP Ma’arif, Latihan Manajemen Krisis-nya Lakpesdam, dan halqoh *fiqih siyasah*-nya P3M. Di tengah NU sudah muncul kritik atas ideologi patriarki kitab *Uqud al-Lujain*, bahkan yang lebih keras lagi adalah kritiknya Said Aqil Siradj terhadap doktrin Aswaja yang sempat bikin heboh itu.

Sedemikian majukah NU itu kini? Tapi “NU” yang mana? Bisa jadi benar bahwa spektrum NU itu sangat luas dan beragam. Ada figur seperti Gus Dur, Muhammad AS. Hikam, Masdar F. Mas’udi, Said Aqil Siradj; tapi di sana ada pula figur seperti Hamzah Haz, Yusuf Hasyim, Matori Abdul Jalil dan figur semacam Agus

Miftach. Sementara di level generasi mudanya sendiri juga beragam: ada yang fundamentalis, ada yang ikut-ikutan jadi PSI, ada yang jadi “Islam modernis”. Bahkan ada yang lebih radikal: ikut dalam gerakan mahasiswa, Famred dan Forkot, dan juga terlibat dalam PRD.

Lalu, di mana kemajuan itu? Tampaknya mungkin NU hanya menampilkan fenomena luar yang sangat luar biasa hingga membuat terpesona kalangan pengamat luar, seperti Greg Barton, Andree Feilard, dan Robert Hefner. Pihak-pihak yang terakhir ini tidak pernah habisnya memuji-muji NU sebagai gerakan pro-demokrasi, pro-*civil society*, pro-pluralisme, dst. Tapi, bila ditilik ke dalam kulturnya, ke dalam sistem pemikirannya, ke dalam memori kolektif warga NU, kita pasti akan menemukan fenomena dinamika yang “jalan di tempat”.

Kami tunjukkan misalnya pada gejala kian banyaknya pembacaan-pembacaan masa kini atas konsep *al-kulliyah al-kebams* ini di kalangan NU. Ia dibaca dengan pembacaan “demokrasi”, “HAM”, “pluralisme”, “toleransi”, “kebebasan beragama dan berpikir”, dan terakhir sebagai “*civil society*”. Jarang, bahkan tidak ada, yang mempertanyakan konsep itu sendiri: apakah *hifz al-din* berarti “pengakuan atas kebebasan beragama”? Apakah *hifz al-‘aql* berarti pengakuan atas “kebebasan berpikir”? Bukankah konsep itu sendiri yang lahir dari “rahim” sejarah Sunnisme yang menekankan harmonitas dan stabilitas? Jangan-jangan, apa yang disebut dengan *hifz al-din* dan *hifz al-‘aql* itu adalah bahasa lain untuk “konservatisme beragama model ortodoksi” dan “pembakuan homogenitas berpikir model Sunni”? Bukankah doktrin

Sunni dalam sejarahnya tidak pernah mengakui hak-hak sosial dan politik kaum minoritas non-muslim? Bukankah sejarah Sunnisme di dunia Islam adalah sejarah penyeragaman cara-cara berpikir, karena berpikir di luar garis ortodoksi dianggap *bid'ah*, *kufir*, *syirk*, *dlalâl*, dan *zindîq*?

Pertanyaan-pertanyaan ini perlu diajukan untuk mengukur sejauhmana pembacaan-pembacaan tersebut merupakan hasil olahan pemikiran modern yang telah mengalami transformasi atau malah bahasa baru untuk pemikiran konservatif dan ortodoksi? Kalau orang-orang seperti Nurcholish Madjid dan M. Dawam Rahardjo menjadikan sejarah Nabi di Madinah sebagai lahan pembacaan-pembacaan modern, maka kini di NU juga telah muncul kecenderungan serupa. Cuma bukan masyarakat Madinah, tapi konsep *al-kulliyah al-kebams* itu.

Memang benar, kini telah muncul tawaran baru dalam pola pemikiran NU yang telah diputuskan dalam Muktamar

Cipasing 1994. Yaitu berpikir model *manhaji* (kontekstual-metodologis), bukan lagi *qauli* (tekstual). Tapi, masalahnya kemudian warga NU masih membatasi model *manhaji* pada lingkup pemikiran Sunni, apalagi itu didukung oleh pemilahan antara *al-kutub al-mu'tabarab* dan *al-kutub ghair al-mu'tabarab*. Mungkinkah bicara metodologi yang lebih mencerahkan dan rasional kalau membatasi diri pada metodologi Sunni atau Aswaja? Jangan-jangan, model *manhaji* hanya merupakan bahasa baru bagi ortodoksi dan konservatisme. Mungkinkah kita bicara tentang demokrasi, *civil society* dan pluralisme dengan membatasi lingkup pemikiran pada ortodoksi Sunni semata?

Pertanyaan-pertanyaan ini perlu diagen-dakan dalam Muktamar nanti. Tapi, sayang, NU hingga kini belum menunjukkan orientasinya ke masa depan, tapi lebih ke masa lalu, dengan menjadikan doktrin Sunni sebagai sarang mitos-mitos, termasuk *al-kulliyah al-kebams* itu.

Ahmad Baso